

Analisis Prosedur Audit Kas Setara Kas BLUD Puskesmas X Oleh KAP ENHA

Puput Mia Ayuningtias^{1*}, Diah Hari Suryaningrum²

^{1, 2} Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

21013010170@student.upnjatim.ac.id^{1*}

Alamat: Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: 21013010170@student.upnjatim.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze the cash equivalent audit procedures at the Regional Public Service Agency, Puskesmas X, which are implemented by the ENHA Public Accounting Office. The research method used is descriptive-qualitative with a case study approach, and the technical data analysis used is descriptive analysis, which is used to describe the cash equivalent audit procedures implemented by KAP ENHA. The cash equivalent audit procedure implemented by KAP ENHA consists of control and substantive tests. Substantive tests carried out by KAP ENHA are: comparing the cash equivalent balance in the financial report with the general ledger; carrying out cash taking; comparing the cash equivalent balance in the current account with the general ledger and trial balance; carrying out bank confirmations; making lead schedules or work papers; and evaluating the adequacy and disclosure of cash equivalents in BLUDs in the financial statements. The results of this research indicate procedures for implementing the audit of cash equivalents in BLUD Puskesmas disclosure of BLUD cash equivalents.*

Keywords: *Audit, cash, ENHA*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur audit kas setara kas Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas X yang diterapkan Kantor Akuntan Publik ENHA. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan prosedur audit kas setara kas yang diterapkan KAP ENHA. Prosedur audit kas setara kas yang diterapkan oleh KAP ENHA terdiri dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian substantif yang dilakukan oleh KAP ENHA yaitu, membandingkan saldo kas setara kas pada laporan keuangan dengan buku besar, melakukan *cash opname*, membandingkan saldo kas setara kas pada rekening koran dengan buku besar dan neraca saldo, melakukan konfirmasi bank, membuat *lead schedule* atau kertas kerja utama, dan mengevaluasi kecukupan dan pengungkapan kas setara kas di BLUD pada laporan keuangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur audit kas setara kas pada BLUD Puskesmas X yang diterapkan oleh KAP ENHA sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tidak terdapat salah saji material dari penyajian dan pengungkapan kas setara kas BLUD.

Kata Kunci: audit, kas, ENHA

1. PENDAHULUAN

Badan Layanan Umum Daerah merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memberikan pelayanan berupa barang dan/atau jasa kepada masyarakat tanpa berorientasi pada keuntungan. Salah satu entitas SKPD yang berstatus BLUD adalah puskesmas. Puskesmas memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya untuk menjalankan praktik bisnis guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut (Sulastiningsih et al., 2022) fleksibilitas yang diberikan kepada Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan pendapatan, belanja, kas, utang dan piutang, serta pengelolaan investasi.

Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tahun 2015. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan keuangan. BLUD puskesmas sebagai entitas sektor publik juga bertanggungjawab terhadap transparansi pengelolaan keuangan publik (Lestari & Purnamawati, 2022). Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya audit laporan keuangan atas semua komponen laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

Secara umum audit adalah proses akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang diperoleh dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent (Arens et al., 2021). Standar prosedur audit yang digunakan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah adalah berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia. Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga, BPK wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan BLUD Puskesmas.

Menurut (Kristianto & Putri, 2021) laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah harus di audit oleh auditor dari pihak eksternal pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, pelaksanaan audit BLUD Puskesmas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan pada (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, 2022). Berdasarkan peraturan tersebut Kantor Akuntan Publik diperbolehkan melakukan pelaksanaan pemeriksaan BLUD Puskesmas jika KAP memenuhi kriteria yang tercantum dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022.

Dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan laporan keuangan, auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap seluruh akun dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai kewajaran dari penyajian laporan keuangan sudah disajikan, apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satu akun yang paling krusial dalam keberlangsungan usaha adalah kas dan setara kas. Kas dan setara kas merupakan aset yang paling likuid dari aset lainnya yang dimiliki oleh suatu entitas. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagai entitas sektor publik atau organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan kasnya, rentan terhadap penyelewengan dan tindak

kecurangan. Menurut (Saenggo & Muslimin, 2023) tindak kecurangan dapat terjadi pada asset penting yang krusial bagi suatu entitas, salah satu asset tersebut adalah kas dan setara kas. (Ginting et al., 2021) juga menyatakan bahwa praktik *fraud* pada perusahaan nirlaba dilakukan oleh pihak internal, baik oleh pengurus maupun anggota yang saling bekerja sama. Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya audit atas akun kas setara kas pada laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas. Tujuan audit terhadap akun kas setara kas adalah untuk mengetahui kebenaran saldo kas setara kas apakah sudah dicatat secara wajar dalam laporan keuangan.

Subjek penelitian ini adalah Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas X yang merupakan klien dari KAP ENHA. Untuk menjalankan pembangunan kesehatan di beberapa wilayah kecamatan, BLUD Puskesmas X adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten YZ. Puskesmas melaksanakan beberapa tugas Dinas Kesehatan Kabupaten YX sebagai unit pelaksana teknis. Berdasarkan informasi yang peneliti temukan BLUD Puskesmas X membuka rekening kas BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni mendapatkan rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah saat proses pembukaannya. BLUD Puskesmas X melakukan pengelolaan kas sesuai dengan Peraturan Bupati No. 10 tahun 2020 Pasal 42, yaitu rekening kas BLUD Puskesmas digunakan untuk semua pembayaran dan pengeluaran yang berasal dari dana jasa layanan, hibah, kerja sama dengan pihak lain, dan APBD. Dalam pengelolaan kas, Puskesmas X membuat perencanaan untuk penerimaan dan pengeluaran kas, menyimpan kas dan pengelolaan atas rekening bank. Hal ini sesuai dengan karakteristik Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan kasnya. BLUD memiliki kekuasaan untuk mengelola kas secara mandiri, yaitu dengan menyimpan atau melakukan investasi jangka pendek. Pengelolaan kas BLUD berdampak pada transaksi keuangan yang tercermin dalam Laporan Keuangan.

Untuk menilai kewajaran dan kebenaran apakah saldo kas setara kas telah disajikan dan dihitung dengan benar dalam laporan keuangan BLUD Puskesmas X, maka perlu dilakukan pelaksanaan prosedur audit atas pemeriksaan kas dan setara kas oleh KAP ENHA. Prosedur audit kas setara kas bertujuan untuk mengetahui bahwa saldo telah mencerminkan semua jumlah kas dan pengungkapannya pada laporan keuangan (Masnawaty Sangkala, 2022) Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Prosedur Audit Kas Setara Kas BLUD Puskesmas X Oleh KAP ENHA”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Prosedur Audit

Prosedur audit merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai risiko salah saji material terhadap laporan keuangan (Febyyanti & Praptoyo, 2019). Prosedur audit dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal entitas serta bertujuan untuk menentukan risiko salah saji material pada laporan keuangan.

Prosedur Audit Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan salah satu unsur dan akun terpenting dalam suatu organisasi untuk kegiatan operasional. Kas dan setara kas biasanya berbentuk tabungan, giro, dan *petty cash* atau kas kecil. Prosedur audit kas setara kas meliputi identifikasi risiko yang berdampak pada bisnis klien, menetapkan salah saji yang dapat diterima, menilai risiko bawaan, menilai risiko kontrol, pengujian, *test of control*, serta prosedur analitik substantif transaksi (Tatik & Afandi, 2022).

Badan Layanan Umum Daerah

Menurut (Hadi, 2023), Badan Layanan Umum Daerah merupakan organisasi pemerintah yang memberikan layanan berdasarkan kriteria efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan undang-undang, tetapi BLUD memiliki wewenang dalam fleksibilitas pengelolaan keuangan jika dibandingkan dengan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. The SERVQUAL model includes calculating the difference between the values given by customers for each pair of statements related to expectations and perceptions (Diana Zuhro et al. 2024 : 98) In addition, mortgage business also becomes a funding solution for the community, breaking the practice of debt bondage and avoid the moneylenders' circle. (Diana Zuhro et. Al 2018 : 397)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti mengkaji suatu program, kejadian, proses, dan aktivitas terhadap suatu subjek (Hardani et al., 2020). Subjek penelitian ini adalah Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas X yang merupakan klien dari Kantor Akuntan Publik

ENHA. Penelitian dilakukan di KAP ENHA. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan auditor KAP ENHA dan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan prosedur audit kas setara kas, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan BLUD Puskesmas X, kertas kerja pemeriksaan KAP ENHA, dan kajian literatur berupa buku maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur audit atas akun kas setara kas BLUD Puskesmas X yang diterapkan oleh KAP ENHA. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan Maret sampai Juni 2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan prosedur audit kas setara kas yang dilakukan oleh KAP ENHA pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas X bertujuan untuk menilai kewajaran atas saldo kas dan setara kas pada laporan keuangan. Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit kas setara kas adalah laporan keuangan per 31 Desember 2023, buku besar, daftar kas yang terdiri dari buku kas umum penerimaan dan buku kas umum pengeluaran, dan rekening koran. Adapun tahapan dalam prosedur pelaksanaan audit kas setara kas adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Pengendalian (*Test of Control*)

Pengujian pengendalian bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi *internal control* atas transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kas BLUD Puskesmas. Prosedur tersebut dilakukan dengan pengujian sampel transaksi. Auditor KAP ENHA menentukan sampel transaksi dan mengumpulkan setiap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas, memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan telah terdapat otorisasi dari pihak yang berwenang dan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan juga memenuhi atribut *test of control* (TOC). Setelah dipastikan dokumen-dokumen tersebut lengkap dan memenuhi atribut TOC, maka auditor dapat menarik kesimpulan dari hasil evaluasi *internal control* tersebut, apakah pengendalian internal BLUD efektif. Berikut hasil wawancara dengan auditor:

“Kami melakukan prosedur test of control dengan melakukan dua langkah, pertama penentuan sampel yang dilakukan dengan memilih dua sampai 3 transaksi terbesar dari penerimaan dan pengeluaran kas, kemudian melakukan vouching atas sampel transaksi yang telah ditentukan dengan menggunakan atribut TOC. Terdapat 4 atribut TOC, yaitu Supporting Document Completeness, Mathematical Accuracy, Authorization, dan Traced to G/L and Sub G/L”.

Berdasarkan pemaparan dari auditor, prosedur *test of control* dilakukan dengan menentukan sampel transaksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD, kemudian melakukan *vouching* dari sampel transaksi tersebut dengan menggunakan atribut TOC untuk menilai ketaatan BLUD Puskesmas X dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank. *Vouching* merupakan prosedur yang bertujuan untuk memastikan dan memeriksa bahwa transaksi yang terjadi telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan bukti transaksi. Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan *vouching* adalah bukti kas masuk dan kas keluar, invoice, kwitansi, dan bukti pendukung transaksi lainnya.

b. Prosedur Analitis Substantif

Setelah dilakukan pengujian pengendalian, auditor akan melakukan prosedur analitis sebagai pengujian substantif atas akun kas setara kas BLUD. Prosedur analitis merupakan prosedur yang dilakukan dengan mengevaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara data keuangan dan non keuangan (Akuntan & Indonesia, 2021). Prosedur analitis digunakan auditor sebagai pengujian substantif (prosedur analitis substantif). Pengujian substantif yang diterapkan pada prosedur audit kas setara kas BLUD Puskesmas X adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan Saldo Kas Setara Kas pada Laporan dengan Buku Besar

Pertama auditor akan melacak jumlah buku besar dengan saldo pada neraca. Selanjutnya, membandingkan saldo kas setara kas yang ada pada neraca saldo dengan buku besar BLUD Puskesmas X. Auditor juga membandingkan saldo kas setara kas pada neraca saldo dan buku besar pada periode sebelumnya.

Tabel 1. Perbandingan antara saldo kas 2022 dengan buku besar

Perbandingan antara saldo kas 2022 dengan buku besar			
	Neraca	Buku Besar	Saldo 2022
PT. BPD Jawa Timur, Tbk.	154.000.000,00	154.000.000,00	TRUE
Kas Lainnya - Lain-lain BNI	-	-	TRUE
	-	-	TRUE

Sumber: Dokumen Audit, data diolah (2024)

Tabel 2. Kertas Kerja Prosedur Membandingkan Penyajian Akun Kas

Perbandingan antara saldo akhir Kas 2023 dengan Buku Besar			
	Neraca	Buku Besar	Saldo
PT. BPD Jawa Timur, Tbk	388.000.000,00	388.000.000,00	TRUE
Kas Lainnya - Lain-lain BNI	10.000.000,00	10.000.000,00	TRUE
	-	-	TRUE

Sumber: Dokumen Audit, data diolah (2024)

Berikut pemaparan auditor terkait prosedur ini:

“Perbandingan saldo kas setara kas pada laporan keuangan dengan buku besar bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi kas yang masuk dalam laporan keuangan telah terposting dalam buku besar dengan benar, dalam artian tidak terdapat selisih yang material”.

Berdasarkan pemaparan auditor dan tabel 1 dan 2, dapat dilihat bahwa tidak terdapat selisih antara saldo kas setara kas pada laporan keuangan dengan saldo kas setara pada buku besar. Artinya, saldo kas setara kas pada laporan keuangan sudah terposting dengan benar dalam buku besar BLUD Puskesmas X.

2) Melakukan *Cash Opname*

Cash opname merupakan perhitungan fisik kas yang dimiliki klien. Tujuan perhitungan fisik kas adalah untuk memastikan keberadaan kas yang disajikan dalam laporan keuangan (Defa & Sixpria, n.d.). Pada prosedur ini, auditor melakukan *fieldwork* ke BLUD Puskesmas X. Sebelum melakukan *cash opname*, auditor menyiapkan berita acara pemeriksaan kas (BAP) Kas. Selanjutnya auditor akan melakukan *cash count* (perhitungan fisik kas) dengan mendatangi bagian kasir. Auditor akan menghitung total Auditor akan menghitung total jumlah uang kertas dan logam yang telah dicatat sebelumnya dalam BAP kas. Berikut hasil wawancara dengan auditor terkait dengan *cash opname*:

“Cash opname ini harus dilakukan, karena dengan cash opname kami bisa tau kas tersebut benar adanya, laporan kas per pemeriksaan kas telah sesuai dengan kas yang sebenarnya pada saat pemeriksaan kas dilakukan, dan kas merupakan hak milik entitas”.

“Juga untuk memastikan akun kas pada laporan keuangan periode 31 Desember telah sesuai dengan kas yang sebenarnya (kas tunai) per 31 Desember”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa *cash opname* merupakan prosedur yang bertujuan untuk memastikan keberadaan kas

yang dipegang oleh kasir apakah telah sesuai dengan mutasi kas dalam catatan BLUD Puskesmas X dan kas tersebut adalah benar milik BLUD. Dari hasil perhitungan, tidak ditemukan selisih antara catatan mutasi kas BLUD dengan kas yang berada di kasir.

3) Mendapatkan *Copy* Rekening Koran dan Membandingkan Saldo pada Rekening Koran dengan Buku Besar dan Neraca Saldo

Pada prosedur ini auditor membutuhkan rekening koran yang dimiliki oleh BLUD Puskesmas X. Setelah mendapatkan semua rekening koran, auditor akan mencatat setiap saldo dari rekening koran tersebut. Selanjutnya auditor membandingkan dengan saldo pada buku buku besar dan neraca saldo apakah nilainya cocok atau terdapat selisih. Jika terdapat perbedaan atau selisih nilai antara pengujian rekonsiliasi bank yang dilakukan oleh auditor dengan buku besar dan neraca saldo BLUD, maka auditor akan menganalisis apakah diperlukan untuk membuat penyesuaian atau *adjustment* untuk selisih tersebut.

“Kami harus melakukan rekonsiliasi bank untuk memastikan bahwa saldo bank pada kas dan setara kas telah sesuai dengan bukti yaitu rekening koran, jika ada yang saldo yang tidak sesuai maka kami akan meminta keterangan manajemen. Untuk BLUD Puskesmas X ini tidak terdapat selisih antara saldo pada buku besar dan neraca dengan rekening koran yang telah kami peroleh”.

Tabel. 3 Saldo Rekening Koran dengan Buku Besar dan Neraca Saldo

	PT. BPD Jawa Timur, Tbk.	Kas Lainnya - Lain-lain BNI	Saldo 2023
Rekening Koran	388.000.000,00	10.000.000,00	398.000.000,00
Buku Besar	388.000.000,00	10.000.000,00	398.000.000,00
Neraca Saldo	388.000.000,00	10.000.000,00	398.000.000,00

Sumber: Dokumen Audit, data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa saldo bank BLUD Puskesmas X pada buku besar dan neraca saldo telah sesuai dengan rekening koran per 31 Desember 2023.

4) Melakukan Konfirmasi Bank

Setelah auditor memperoleh hasil dari membandingkan saldo kas setara kas pada buku besar dan neraca saldo dengan rekening koran, selanjutnya auditor akan membuat surat konfirmasi dan mengirimkan surat konfirmasi tersebut kepada

seluruh rekening bank sesuai dengan daftar bank yang dimiliki oleh BLUD Puskesmas X. Surat konfirmasi ditujukan kepada pihak ketiga (pihak bank) untuk meminta konfirmasi saldo bank pada tanggal neraca. Berikut hasil wawancara dengan auditor terkait dengan konfirmasi bank:

“Konfirmasi bank ini merupakan prosedur yang sangat penting mbak, karena bank merupakan pihak ketiga yang independen terhadap klien. Sehingga kami bisa memastikan bahwa rekening bank atas nama entitas telah tercantum dan diungkapkan pada laporan keuangan sesuai keadaan yang sebenarnya serta kami juga bisa memastikan bahwa saldo pada buku besar, neraca saldo, dan rekening koran itu sudah sesuai”

Setelah mendapat surat balasan dari pihak bank, auditor akan membuat *control confirmation* bank. *Control confirmation* bank digunakan auditor untuk membandingkan atau mencocokkan saldo bank per buku laporan, rekening dan saldo pada balasan konfirmasi. Tabel 4 merupakan *control confirmation* yang dibuat oleh auditor.

Tabel 4. *Confirmation Control* BLUD Puskesmas X

Name	Posted	Reply	Per Book	Per Confirmation	Selisih
	Date	Date	Book		
PT. BPD Jawa Timur, Tbk.	20-Feb-24	04-Mar-24	388.000.000,00	388.000.000,00	-
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk			10.000.000,00	10.000.000,00	-
Total			398.000.000,00	398.000.000,00	-

Sumber: Dokumen Audit, data diolah (2024)

Selanjutnya auditor akan membandingkan saldo pada buku besar, neraca saldo dan rekening koran dengan hasil jawaban konfirmasi bank. Jika terdapat perbedaan atau selisih dari hasil perbandingan tersebut, maka auditor akan meminta manajemen untuk melakukan rekonsiliasi. Setelah dilakukan perbandingan atau pencocokan, tidak terdapat selisih atau perbedaan saldo pada buku besar, neraca saldo, dan rekening koran dengan konfirmasi bank pada BLUD Puskesmas X. Tabel 5 merupakan hasil perbandingan saldo kas setara kas BLUD Puskesmas X dengan rekening koran per 31 Desember 2023 dengan Konfirmasi Bank.

Tabel 5. Hasil Perbandingan Saldo Kas Setara Kas dengan Konfirmasi Bank

	PT. BPD Jawa Timur, Tbk.	Kas Lainnya - Lain-lain BNI	Saldo 2023
Neraca	388.000.000,00	10.000.000,00	398.000.000,00
Rekening Koran 31 Des 2023	388.000.000,00	10.000.000,00	398.000.000,00
Konfirmasi Bank	388.000.000,00	10.000.000,00	398.000.000,00

Sumber: Dokumen Audit, data diolah (2024)

5) Membuat *Lead Schedule*

Setelah melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan kas setara kas, auditor akan membuat kertas kerja utama atau *lead schedule*. *Lead Schedule* merupakan rincian hasil prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan auditor. *Lead Schedule* juga memuat kesimpulan dari hasil pengujian substantif atas kas setara kas BLUD Puskesmas X. Gambar 1 merupakan kertas kerja utama atau *lead schedule* kas pada BLUD Puskesmas X.

KERTAS KERJA UTAMA (LEAD SCHEDULE)							
KAS PADA BLUD							
Nama Sub Akun	Kode Akun	KKP Ref	Saldo 2023	Jurnal Penyesuaian		Saldo Setelah Diperiksa	Saldo 2022
				Debet	Kredit		
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8
Kas Pada BLUD							
PT BPD Jawa Timur, Tbk		1.A	388.000.000,00	-	-	388.000.000,00	154.000.000,00
Kas Lainnya Setara Kas		1.B	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-
Kas Lainnya - Lain-lain BNI							
			398.000.000,00	-	-	398.000.000,00	154.000.000,00

Gambar 1. Lead Schedule

Sumber: Dokumen Audit, data diolah (2024)

6) Evaluasi Kecukupan Penyajian dan Pengungkapan Kas di BLUD pada Laporan Keuangan

Tahapan terakhir dalam pelaksanaan prosedur audit kas setara kas BLUD Puskesmas X adalah auditor akan mengevaluasi penyajian dan pengungkapan kas setara pada laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan keadaan entitas dan semua telah diungkap pada laporan keuangan. BLUD Puskesmas X melaporkan jumlah Kas dan Bank sebesar Rp 398.000.000,00 dalam Neraca per 31 Desember 2023. Berdasarkan perhitungan kas dan konfirmasi bank telah sesuai dengan saldo akhir kas dan bank.

Tabel 6. Penyajian dan Pengungkapan Kas Setara Kas BLUD Puskesmas X

Keterangan	31 Des 2023 Per Klien	31 Des 2023 Per Audit	Selisih
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0	Rp0	Rp0
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0	Rp0	Rp0
PT BPD Jawa Timur Tbk	Rp388.000.000,00	Rp388.000.000,00	Rp0
PT Bank Nasional Indonesia Tbk	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0
Jumlah	Rp398.000.000,00	Rp398.000.000,00	Rp0

Sumber: Dokumen Audit, data diolah (2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pelaksanaan prosedur audit kas dan setara kas pada BLUD Puskesmas X, disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur di KAP ENHA sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Prosedur audit kas setara kas BLUD Puskesmas X terdiri dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Hasil dari pengujian menggunakan atribut TOC atas akun kas setara kas pada BLUD Puskesmas X yaitu, kas setara kas telah diakui dan dicatat sesuai dengan transaksi. Pada pengujian analitis substantif, juga tidak ditemukan salah saji yang material pada penyajian dan pengungkapan kas setara kas BLUD Puskesmas X. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyajian saldo kas setara kas sudah tersaji secara wajar pada laporan keuangan BLUD Puskesmas X. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya diperoleh melalui sudut pandang auditor. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menggunakan sudut pandang dari klien, yaitu BLUD Puskesmas X.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntan, I., & Indonesia, P. (2021). *Akuntan Publik Standar Audit 520 (Revisi 2021) Prosedur Analitis*. <http://www.iapi.or.id>
- Arens, A. A., Elder, Randal J, Beasley, M. S., Hogan, C. E., & Jones, J. C. (2021). *Auditng: The Art and Science of Assurance Engagements, Canadian Edition* (15th ed.).
- Defa, D. M., & Sixpria, N. (n.d.). *Prosedur Audit Cash Opname dan Confirmation Control untuk Menguji Aseri Eksistensi pada Akun Kas dan Setara Kas*.
- Febyyanti, R., & Praptoyo, S. (2019). Prosedur Audit Untuk Merespon Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Karena Kecurangan (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Sugeng dan Rekan di Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Ginting, R., Yanto, F., P. S., R. A., & Darmawan, Y. (2021). Akuntansi Forensik Dalam Mengungkapkan Dan Menelisik Fraud: Studi Kasus Organisasi Nirlaba. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 10(2), 50. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v10i2.50982>

- Hadi, S. (2023). *Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Oleh Pemerintah Daerah*.
- Hardani, Ustiawaty, J., Andriani, H., Istiqomah, R., Sukmana, D., Fardani, R., Auliya, N., & Utami, E. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Kristianto, G. B., & Putri, P. L. (2021). Analisis Pelaksanaan Audit Terhadap Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sesuai Permendagri 79 Tahun 2018 Di Kabupaten Banyumas. *J-LEE - Journal of Law, English, and Economics*, 3(1), 102–122. <https://doi.org/10.35960/j-lee.v2i02.670>
- Lestari, N. K. E. K., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Analisis Implementasi E-Budgeting Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, And Product) Serta Dampaknya Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik Di SKPD Kabupaten Karangasem. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(03), 810–821.
- Masnawaty Sangkala. (2022). Tinjauan Atas Prosedur Audit Kas dan Setara Kas Pada Kantor Akuntan Publik di Makassar. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(2), 344–350. <https://doi.org/10.26858/je3s.v3i2.110>
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 3 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218099/peraturan-bpk-no-3-tahun-2022>
- Saenggo, A. T. P., & Muslimin. (2023). Analisis Prosedur Audit Kas Setara Kas (Studi Kasus terhadap Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba XYZ). *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper*, 1–8.
- Sulastiningsih, S., Prasetyo, A. S., & Suprihatin, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Pusat Kesehatan Masyarakat Kejajar 1 Wonosobo (Periode 2016-2020). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(4). <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i4.617>
- Tatik, T., & Afandi, Y. (2022). Implementasi Prosedur Audit Akun Kas Organisasi AYZ Oleh KAP XYZ. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(2), 200–206. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v5i2.129>
- Zuhro Diana et al. 2018. Performance of Active Customers Number PT Pegadaian Indonesia Period 2011 - 2016, *Jurnal MIMBAR*, Universitas Islam Bandung, Vol. 34 No. 2 Desember 2018, 397 - 405
- Zuhro Diana et al. 2024. Impact Of Measurement Of Service Quality Using The Servqual Method, *Digital Innovation : International Journal of Management* Vol. 1 No. 3 July 2024, Page 94-114